|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *JIAP Vol 6, No 3, pp 348-355, 2020**© 2020 FIA UB. All right reserved**ISSN 2302-2698* *e-ISSN 2503-2887*Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)URL: <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>  |  |

Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar)

Dicky Wirasakti a[[1]](#footnote-2)\*

a Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia

|  |  |
| --- | --- |
| INFORMASI ARTIKEL | ABSTRACT |
| Article history:Dikirim tanggal: 16 Oktober 2019 Revisi pertama tanggal: 26 November 2020Diterima tanggal: 30 November 2020Tersedia online tanggal: 10 Desember 2020 | Ponggok is the sub district with the largest poor people in Blitar Regency. According Ministry of Social Affairs data, there are 6,875 KPM BPNT programs. Geographically Ponggok is located in North Blitar which have fertile soil from Kelud eruption. Morphologically Ponggok is connect area between Kediri and Blitar regency so all area can be reached by transportation. Poverty at Ponggok is structural poverty because bad policies. This study aims to determine the process of poverty reduction program planning in Social Service of Blitar Regency. The research method used is qualitative method. Based on the research, the program planning in the Social Service has been suitable according to the stages in the planning theory, and according procedures regulated by Permendagri No.86 of 2017. Some factors that influence the planning process include: human resource planners, social cultural, and system used.INTISARIPonggok merupakan kecamatan dengan jumlah masyarakat miskin terbesar di Kabupaten Blitar. Menurut data SK Kementrian Sosial, terdapat 6.875 orang KPM program BPNT. Secara morfologi Ponggok terletak di Blitar Utara yang kondisi tanahnya subur karena berasal dari letusan Gunung Kelud. Secara administratif Ponggok merupakan penghubung antar kabupaten sehingga seluruh wilayahnya dapat dijangkau oleh transportasi. Kemiskinan di Ponggok merupakan kemiskinan struktural akibat kebijakan yang tidak baik. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui proses perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa perencanaan program di Dinas Sosial telah dilaksanakan sesuai tahapan pada teori perencanaan, dan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Permendagri No.86 Tahun 2017. Beberapa faktor yang memperngaruhi proses perencanaan, yaitu: faktor sumberdaya manusia perencana, lingkungan sosial dan budaya, dan sistem yang digunakan2020 FIA UB. All rights reserved. |
| Keywords: planning, poverty reduction program,top down, bottom up, Ponggok, Blitar Regency. |

1. Pendahuluan

Faludi (1973) berpendapat bahwa perencanaan merupakan aplikasi dari metode ilmiah dalam rangka pembuatan kebijakan. Dalam suatu proses perencanaan, sumber-sumber daya seperti manusia, modal, sarana-prasarana, informasi, teknologi, dan potensi yang ada dipertimbangkan agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan. Sjafrizal (2016) menyatakan bahwa perencanaan tidak akan menghasilkan program pembangunan secara baik apabila tidak memaksimalkan peran masyarakat.

Masalah dalam perencanaan yang terjadi didaerah dimulai dari pelimpahan tugas untuk menyusun dokumen Rencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara jumlah tenaga ahli perencana didaerah sangat terbatas. Permasalahan perencanaan selanjutnya, yaitu masih adanya ego sektoral diantara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang menganggap instansinya merupakan instansi yang paling penting dengan tupoksi yang paling sesuai dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan perencanaan selanjutnya adalah kurang padunya antara perencanaan dan penganggaran, serta perencanaan dengan pelaksanaan dan pengawasan. Agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan maka diperlukan anggaran yang memadai. Permasalahan perencanaan selanjutnya, yaitu adanya kecenderungan perencanaan program yang dilaksanakan dengan pendekatan *top-down*. Pada pendekatan model ini, program direncanakan oleh pemerintah pusat untuk kemudian dilaksanakan secara bersama-sama hingga ke daerah. Program yang direncanakan dipusat seringkali tidak sesuai dengan permasalahan didaerah, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang tepat sasaran dan tidak mampu mengatasi sumber masalah utama yang ada di daerah.

Assegaf (2015) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan makan, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Menurut penyebabnya, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (a) Kemiskinan natural; (b) Kemiskinan kultural; dan (c) Kemiskinan struktural. Menurut Nasikun (2007), kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang terjadi karena kondisi alam yang buruk seperti kekeringan saat musim kemarau namun banjir saat musim hujan, tanah tandus berbatu, sehingga area tersebut kurang mendukung produktifitas penduduknya. Effendi (1995) menjelaskan bahwa kemiskinan kultural merupakan akibat dari masyarakat yang terisolasi, membatasi diri dengan dunia luar dan kurang berkomunikasi dengan daerah lain, sehingga mengakibatkan terbatasnya wawasan dan informasi yang diterima. Hal ini biasanya terjadi pada daerah konflik, wilayah perang dan daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Effendi (1995) menjelaskan bahwa kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya berbagai macam penghambat yang datang dari luar kemampuan seseorang sehingga mencegah seseorang untuk memiliki kesempatan. Hambatan ini bisa berupa birokrasi, maupun peraturan-peraturan resmi yang menghambat seseorang untuk menggunakan peluang yang ada.

Berdasarkan data dari BPS (2019), pada Tahun 2018 Kabupaten Blitar memiliki masyarakat miskin sejumlah 112.400 jiwa dan berdasarkan SK Kemensos hanya sebesar 77.165 jiwa atau 68.8% saja yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Keterbatasan anggaran dan sumber daya organisasi yang tersedia membuat tidak semua masyarakat miskin bisa mendapat bantuan. Berdasarkan SK Kemensos Tahun 2019, Ponggok merupakan kecamatan dengan jumlah masyarakat miskin tertinggi di Kabupaten Blitar. Menurut dokumen RPJMD Kecamatan Ponggok secara morfologi berada diwilayah yang tanahnya subur karena tanahnya berasal dari letusan Gunung Kelud yang rutin erupsi. Secara administratif Kecamatan Ponggok menghubungkan antara Kediri dan Blitar, sehingga seluruh wilayah Ponggok dapat dijangkau oleh transportasi. Kemiskinan yang ada di Kecamatan Ponggok merupakan kemiskinan struktural akibat kebijakan yang kurang tepat. Untuk mengetahui masalah yang terjadi maka penelitian dilakukan pada tahap perencanaan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis “Bagaimana perencanaan program penanggulangan kemiskinan; dan bagaimana faktor penghambat dan pendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan.”

1. Teori
	1. *Teori Perencanaan*

Conyers (1991) berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu usaha yang secara sadar, terorganisir, dan terus menerus dilakukan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu proses perencanaan, sumber-sumber daya seperti manusia, modal, sarana-prasarana, informasi, teknologi, dan potensi yang ada dipertimbangkan agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan. Alisjahbana (2012) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan sangat diperlukan, salah satunya adalah untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik. Faludi (1973) berpendapat bahwa perencanaan merupakan aplikasi dari metode ilmiah dalam rangka pembuatan kebijakan. Pendapat Faludi didukung oleh Allmendinger (2009) bahwa perencanaan merupakan aktifitas kenegaraan yang harus disahkan terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum perencana membenarkan kegiatan perencanaan yang dilakukannya. Perencana didukung oleh kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Sjafrizal (2016) menyatakan bahwa perencanaan tidak akan menghasilkan program pembangunan secara baik apabila tidak memaksimalkan peran masyarakat. Hal ini karena pada akhirnya masyarakat yang akan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Masyarakat perlu dilibatkan agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam penyusunan suatu kebijakan, sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu mengatasi permasalahan nyata yang ada di masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan diharapkan masyarakat turut mematuhi dan menjaga pelaksanaan program yang sudah direncanakan, serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Bryson (2016) tentang perencanaan strategis.

* 1. *Tahapan Perencanaan*

Sjafrizal (2016) menjelaskan bahwa suatu perencanaan yang baik setidaknya melewati empat tahapan yang saling berkaitan, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dijaga agar tetap konsisten antara satu dengan yang lain. Adapun keempat tahapan tersebut yaitu: (a) Tahap penyusunan rencana; (b) Tahap penetapan rencana; (c) Tahap pengendalian pelaksanaan rencana; dan (d) Tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana.

Apabila keempat tahapan perencanaan tersebut dilakukan, maka akan menghasilkan suatu perencanaan yang baik. Adapun ciri-ciri perencanaan yang baik menurut Sjafrizal (2016), yaitu: (a) Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta; (b) Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu; (c) Merinci tujuan dan prioritas pembangunan; (d) Menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan; (e) Strategi dan kebijakan bersifat spesifik; (f) Berisikan perencanaan kebutuhan investasi; (g) Memuat proyeksi selama periode perencanaan; dan (h) Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya.

* 1. *Teori Kemiskinan*

Effendi (1995) yang disempurnakan oleh Suyanto (2013) serta Khomsan &
 Dharmawan (2015) menjelaskan kemiskinan kedalam empat bentuk, yaitu: (a) Kemiskinan absolut, merupakan suatu kondisi masyarakat dimana penghasilannya tidak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Masyarakat tipe ini berada di bawah garis kemiskinan dan dapat disebut sebagai masyarakat yang miskin secara mutlak; (b) Kemiskinan relatif, yaitu suatu keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar manusia sesuai kebutuhan saat itu. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia bukan hanya pangan, sandang dan pangan saja melainkan juga pendidikan dan kesehatan; (c) Kemiskinan kultural, terjadi akibat masyarakat yang terisolasi, membatasi diri dengan dunia luar dan kurang berkomunikasi dengan daerah lain, sehingga mengakibatkan terbatasnya wawasan dan informasi yang diterima. Hal ini biasanya terjadi pada daerah konflik; serta (d) Kemiskinan struktural, disebabkan oleh adanya berbagai macam penghambat yang datang dari luar kemampuan seseorang sehingga mencegah seseorang untuk memiliki kesempatan. Hambatan ini bisa berupa birokrasi, maupun peraturan-peraturan resmi yang menghambat seseorang untuk menggunakan peluang yang ada.

1. Metode Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan didasarkan pada beberapa pendapat, yaitu Ahmad (2015) dan Moleong (2016). Adapun tahapan dalam penelitian ini antara lain: melakukan observasi permasalahan yang ada diwilayah dan menghimpun data awal penelitian; melakukan analisis terhadap proses perencanaan dan dokumen perencanaan; menganalisis peraturan terkait perencanaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan; melakukan penggalian data dan kroscek informasi tentang perencanaan program penanggulangan kemiskinan (melalui wawancara, observasi dan studi dokumen); serta menghimpun data yang diperoleh dari hasil penelitian. Tahap selanjutnya sesuai dengan pendapat dari Dey (1993) dan Emzir (2014), yaitu memilah-milah dan mengklasifikasikan data yang diperoleh berdasarkan kesamaan informasi yang dimiliki, melakukan analisis terhadap data secara keseluruhan sesuai fokus penelitian, dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial dan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Situs penelitian merupakan tempat-tempat khusus yang direncanakan akan digunakan untuk memperoleh data penelitian. Adapun situs dalam penelitian ini antara lain: Ruang Penyusunan Program, ruang Kepala Dinas, Kantor Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan Ponggok, dan wilayah di Kecamatan Ponggok.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan ASN perencana yang ada pada dinas sosial, ASN bidang yang menangani program penanggulangan kemiskinan, kepala dan sekretaris dinas, koordinator tenaga kesejahteraan sosial kabupaten, ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan dengan masyarakat penerima manfaat yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara, dilakukan terhadap ASN perencana yang ada pada dinas sosial, ASN bidang yang menangani program penanggulangan kemiskinan, kepala dan sekretaris dinas, koordinator tenaga kesejahteraan sosial kabupaten, ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan dengan masyarakat penerima manfaat yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan. Hasil wawancara akan direkam dan dicatat untuk disajikan dalam data penelitian. Observasi dilakukan terhadap kondisi masyarakat miskin penerima manfaat dari bantuan program penanggulangan kemiskinan seperti BPNT, PKH, dan bantuan lainnya. Hasil dari observasi berupa uraian deskriptif yang menggambarkan kondisi tentang apa yang diamati, dilihat, didengar dan dianalisa oleh peneliti. Studi dokumentasi dilakukan terhadap segala bentuk dokumen yang menganalisa hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dan dokumen perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan
	1. *Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan*

Dinas sosial merupakan perwakilan pemerintah yang menangani urusan sosial, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Hal ini linier dan sesuai dengan Peraturan Presiden No.166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, diketahui bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang ada didaerah dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu program-program yang merupakan hasil dari kebijakan pemerintah pusat. Program-program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Nasional (PBIN), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan kelompok kedua, yaitu program-program yang merupakan hasil dari kebijakan pemerintah daerah. Program-program tersebut antara lain Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Program Pemberdayaan Sosial.

Dalam rangka menjalankan program-program tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar No. 48 Tahun 2016; disebutkan bahwa Dinas Sosial memiliki tugas sebagai sumber data calon penerima manfaat yang akan diberi bantuan. Sumber data tersebut berupa Basis Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskisn (BDT PPFM). Aplikasi yang berisi data tersebut, yaitu SIKS-NG.

* + 1. *Proses Perencanaan Program Secara Top-Down*

Pada Dinas Sosial terdapat tiga program penanggulangan kemiskinan yang perencanaannya dilakukan dengan pendekatan *top-down*. Ketiga program tersebut antara lain PKH, PBIN, dan BPNT. Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dijelaskan bahwa proses *top-down* berarti suatu perencanaan dimulai dari pemerintah pusat yang kemudian dilaksanakan hingga ke pemerintah daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam proses perencanaan program-program tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, diketahui bahwa peran permerintah daerah dalam program-program yang perencanaannya menggunakan pendekatan secara *top-down*, yaitu sebagai fasilitasi dan dan evaluasi.

Dalam fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH), peran Dinas Sosial, yaitu dalam hal perencanaan data KPM. Dimulai dari pengusulan masyarakat calon KPM, fasilitasi Pendamping dan Operator PKH dalam melakukan verifikasi dan validasi data KPM. Dalam fasilitasi program Penerima Bantuan Iuran Nasional (PBIN), peran Dinas Sosial, yaitu dalam hal perencanaan data KPM. Dalam PBIN data dikirim oleh pemerintah pusat/ kementrian melalui aplikasi e-pbi kemudian diterima oleh dinas sosial. Selanjutnya data tersebut diteruskan ke operator desa untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Data kemudian dirapatkan dalam forum Musdes dan Muskel. Data yang telah disepakati akan diberi surat pengantar dari desa, kemudian dibuatkan berita acara oleh dinas sosial. Data yang sudah lengkap ini akan diinput kedalam aplikasi e-pbi agar dapat di-SK- kan oleh Kemensos. Dalam fasilitasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); maka peran dinas sosial adalah dalam hal perencanaan data KPM. Data KPM untuk program BPNT disebut BDT (Basis Data Terpadu). Data tersebut berubah dalam satu tahun sebanyak dua kali sesuai dengan perencanaan calon penerima yang diajukan kepada Kemensos. Perubahan data BDT baik bertambah maupun berkurang selalu diunggah melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*). Data dikeluarkan oleh Kemensos, kemudian diverifikasi dan validasi oleh operator desa dibantu dengan dua orang tenaga lapangan. Kewenangan dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon PKM diserahkan kepada pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

* + 1. *Proses Perencanaan Program Secara Botom-Up*

Dinas Sosial Kabupaten Blitar mempunyai lima program penanggulangan kemiskinan yang perencanaannya dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*. Program- program tersebut antara lain Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Program Pemberdayaan Sosial. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.

Proses perencanaan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar melalui pendekatan secara *bottom-up* dialami secara langsung oleh peneliti. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka dapat penulis sajikan tahapan pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat yang terendah (desa), yaitu sebagai berikut: (a) Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musdes; (b) Hasil dari Musdes dibawa ke Muskel, kemudian akan dibuat rangking skala prioritas mana kegiatan yang prioritas dan mana yang lebih prioritas; (c) Hasil dari Muskel dibawa ke Musrenbang kecamatan yang menghadirkan beberapa unsur, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, perangkat desa, BPD, organisasi masyarakat seperti karang taruna dan tokoh wanita, lurah, anggota DPRD yang berasal dari kecamatan tersebut, tim perwakilan kecamatan, dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD); (d) Pendaftaran peserta dan pembukaan acara Musrenbang; (e) Paparan program prioritas oleh perwakilan dari OPD dan materi dari narasumber lainnya; (f) Proses tanya jawab dan dialog, penyampaian usulan dari masyarakat bersama perwakilan dari OPD; (g) Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/ kelurahan, kemudian dinilai apakah usulan tersebut sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah serta sesuai dengan tupoksi OPD. Misalnya pengusulan pembangunan jalan didesa tertentu, akan dinilai apakah sesuai dengan prioritas pembangunan jalan khususnya pada dinas cipta karya pada tahun tersebut. Pernah juga ada pengusulan permintaan bantuan peralatan seni (satu set gamelan), akan dinilai apakah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah khususnya pada disparbudpora; (h) Dilakukan *skoring* untuk menentukan tingkat prioritas usulan yang direncanakan; (i) Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/ kelurahan maka akan disepakati bersama oleh forum. Selanjutnya usulan tersebut akan diselaraskan dengan rancangan rencana program OPD yang ada di dokumen ranwal RKPD; (j) Dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan kecamatan, disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut; (k) Rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang dibacakan kembali, kemudian disepakati dan ditandatangani oleh stakeholder yang hadir pada Musrenbang; (l) Setelah usulan disepakati bersama kemudian diinput pada aplikasi *e-Musrenbang* melalui laman: www.emusrenbang.blitarkab.go.id.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa proses perencanaan program yang dilakukan oleh dinas sosial menggunakan pendekatan secara *bottom-up* sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Permendagri No.86 Tahun 2017. Dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan tentu tidak semua hal bisa berjalan sesuai gambaran pada Permendagri No.86 Tahun 2017. Misalnya adalah usulan yang sepakati oleh masyarakat lebih dominan pada perencanaan pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, pengaspalan, atau revitalisasi bangunan, perbaikan gedung sekolah, pembuatan saluran irigasi, bendungan, pembangunan pustu, dan pembangunan jalan. Terutama perbaikan jalan kabupaten yang tidak bisa didanai oleh dana desa.

* + 1. *Rekomendasi Program Penanggulangan Kemiskinan*

Assegaf (2015) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan akibat dari alam yang kurang produktif, keterisolasian, perang, maupun kesalahan dalam pembuatan kebijakan, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi. Hal ini nampaknya berbeda dengan informasi yang diperoleh dari penelitian dilapangan. Kemiskinan bukanlah akibat, melainkan sebab. Karena miskin, maka orang tua kemudian menjadi TKI dan TKW ke luar negri. Hal ini didukung oleh data bahwa terdapat 5.000 orang dari Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai TKI dan TKW ke luar negeri. Kepergian kedua orang tua ke luar negeri menyebabkan anak dititipkan pada kakek dan neneknya. Anak yang dititipkan ini kemudian menjadi kurang perhatian, sehingga salah pergaulan, mengalami kenakalan remaja, putus sekolah, kurang keterampilan, terlibat minuman keras dan narkoba, serta menjadi anak yang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil peggalian data dengan pekerja sosial, diketahui bahwa Kecamatan Ponggok menempati peringkat pertama di Kabupaten Blitar dalam jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan oleh kepergian kedua orang tua ke luar negri, sehingga anak menjadi kurang perhatian dan salah pergaulan.

Solusi yang bisa dilakukan terkait kemiskinan sebagai sebab, bukan sebagai akibat, yaitu tetap memberikan bantuan yang bersifat pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian maka orang tua tidak terangsang untuk bekerja ke luar negri menjadi TKI dan TKW. Dengan demikian, anak-anak tetap ada yang mengasuh dengan baik, sehingga dapat terhindarkan dari salah pergaulan dan anak berhadapan dengan hukum. Pekerja sosial juga menegaskan bahwa seluruh anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Kecamatan Ponggok memang berasal dari keluarga miskin. Solusi yang bisa dilakukan misalnya membuat regulasi agar kedua orang tua yang ingin menjadi TKI dan TKW haruslah memiliki saudara dirumah yang nantinya akan merawat anak-anak yang ditinggalkan. Perjanjian ini harus dikuatkan dengan tanda tangan diatas materai, sehingga benar-benar mengikat dan berkekuatan hukum. Dengan demikian diharapkan anak-anak yang ditinggal kedua orang tua sebagai TKI dan TKW tetap ada yang mengasuh dengan baik.

* 1. *Faktor Penghambat dan Pendukung Perencanaan program Penanggulangan Kemiskinan*
		1. *Faktor Penghambat*

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan, maka dapat diketahui terdapat empat faktor penghambat perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Hambatan-hambatan tersebut lebih ditekankan pada menghambat proses perencanaan program, dan bukan pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Keempat faktor tersebut dapat diuraikan dengan rinci sebagai berikut:

* + - 1. *Faktor Sumberdaya Manusia Perencana*

Salah satu permasalahan perencanaan yang sering terjadi didaerah, yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Hal ini terjadi tidak hanya dilingkup pemerintah daerah, melainkan dari tingkat terendah, yaitu perencana yang ada dalam pemerintahan desa. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas ini menyebabkan posisi penting yang ada didalam masyarakat hanya diduduki oleh orang itu-itu saja. Karena memang jumlahnya yang kurang, tidak ada lagi masyarakat lain yang mumpuni untuk melaksanakan suatu jabatan. Adanya kecenderungan untuk itu menyebabkan pada saat musyawarah perencanaan program, maka masyarakat yang hadir itu statis, orangnya tetap, dan hal ini terjadi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Blitar. Dengan masyarakat yang hadir itu statis, mengakibatkan usulan yang diajukan dalam perencanaan itu kurang variatif, bersifat monoton dan didominasi oleh pembangunan infrastruktur yang bersifat membangun secara fisik.

* + - 1. *Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya*

Salah satu permasalahan perencanaan yang sering terjadi didaerah, yaitu adanya paradigma yang salah tentang pembangunan. Musrenbang diartikan sebagai ajang untuk mengusulkan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Utamanya infrastruktur yang tidak bisa didanai oleh pemerintah desa, misalnya adalah jalan kabupaten. Keresahan masyarakat atas buruknya kondisi jalan, jembatan yang kerapkali memakan korban membuat mereka beranggapan bahwa Musrenbang merupakan kesempatan untuk memperbaiki seluruh infrastruktur yang kondisinya kurang baik.

Mulai dari tingkat terendah dipemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan masih beranggapan bahwa dalam Musrenbang usulan yang bisa diajukan adalah pembangunan fisik. Pemerintah daerah selalu melakukan sosialisasi setiap tahun kepada masyarakat bahwa dalam Musrenbang bisa diusulkan pembangunan fisik dan non fisik, membangun manusia seutuhnya tidak hanya dari sarana dan prasarana melainkan juka keterampilan dan kesempatan untuk bekerja. Mulai dari ASN yang ada pada pemerintah daerah, ASN yang ada di kecamatan juga selalu memberikan sosialisasi namun nampaknya belum berhasil dengan maksimal.

* + - 1. *Faktor Sistem yang Digunakan*

Melihat fenomena yang ada didaerah bahwa masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, namun adanya kecenderungan bahwa usulan perencanaan didominasi oleh pembangunan infrastruktur, maka pemerintah daerah berusaha membuat perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang sudah berbasis pemberdayaan masyarakat. Misalnya yang pernah dilakukan adalah perencanaan pembangunan saluran air dengan sistem padat karya. Penggunaan mesin dan alat keruk berat diminimalkan, semua dikerjakan secara manual dengan tenaga manusia yang berasal dari masyarakat disekitar proyek pembangunan dilaksanakan. Namun untuk *impact*-nya ternyata tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Masyarakat miskin tetap tidak mau bekerja turun ke lapangan. Mereka lebih memilih mengamen atau menjadi tukang parkir yang penghasilannya banyak tanpa harus susah-susah mengeluarkan tenaga. Tidak semua masyarakat miskin bersikap begitu, namun yang benar-benar mau bekerja jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang menikmati kemalasan.

Fenomena kemiskinan tersebut selain karena memang budaya malas yang ada dimasyarakat, pemerintah sendiri tidak mendukung dengan regulasi yang tepat. Misalnya dengan mengeluarkan regulasi tentang parkir berlangganan, sehingga seluruh tukang parkir yang ada diwilayah tersebut tidak boleh memungut upah. Hal ini akan mengakibatkan dengan sendirinya tukang parkir akan berkurang jumlahnya karena tidak dibayar. Contoh daerah yang tidak menerapkan parkir berlangganan adalah Kota Malang, dimana dapat disaksikan bahwa tukang parkir menjadi profesi yang sangat menjanjikan hasilnya jika dibandingkan dengan buruh maupun karyawan pabrik yang digaji maksimal sebesar UMR.

Selain hal tersebut di atas, masih ada upaya penolakan perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang lain oleh masyarakat. Misalnya adalah program Kelompok Usaha Bersama yang diluncurkan oleh pemerintah provinsi. Bantuan modal KUBE diberikan berupa kambing untuk dipelihara. Tidak lama kemudian, kambing dilaporkan mati. Satu kambing difoto dari beberapa sudut supaya nampak berbeda. Kambing dilaporkan mati secara bergantian, tidak semua mati secara bersamaan. Mayat kambing dikubur dengan alasan menghindari bau busuk. Padahal aslinya kambing telah dijual oleh penerima bantuan KUBE. Tidak hanya bantuan berupa kambing, bantuan berupa alat cetak batako mengalami hal serupa. Beralasan batakonya tidak laku, penerima bantuan modal alat cetak batako lebih memilih untuk mengamen dari pada bersusah payah mengangkut pasir dan semen untuk dibuat batako.

* + 1. *Faktor Pendukung*
			1. *Perencanaan Program Secara Mandiri Oleh Pemerintah*

Salah satu faktor yang mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan adalah tingginya kepedulian Aparatur Sipil Negara, baik yang berada dipemerintahan desa (berperan sebagai tokoh masyarakat), pemerintah kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten terhadap perencanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fungsi dasar sosial menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yaitu kebutuhan akan makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu perencanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada difokuskan pada keempat kebutuhan dasar tersebut. Untuk makanan dibantu melalui program Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk kebutuhan tempat tinggal dibantu melalui program bedah rumah, didanai melalui dana dekonsentrasi oleh pemerintah provinsi. Untuk menjadi KPM bedah rumah, maka perencanaan calon penerima KPM-nya diusulkan oleh desa dan diteruskan oleh dinas sosial kabupaten. Syaratnya, yaitu memenuhi konsep ALADIN (Atap, Lantai, dan Dinding) yang tidak layak. Atap dari daun, lantai masih tanah, dan dinding dari bambu yang semi permanen. Untuk pendidikan dibantu melalui Program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk kesehatan dibantu melalui program Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didanai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bantuan-bantuan tersebut penting untuk tetap disediakan oleh pemerintah. Hal ini karena masyarakat miskin yang sudah dibantu melalui beragam program kemudian bisa sejahtera, namun tetap terancam SADIKIN dan JAMILA. Sadikin dan Jamila merupakan jargon dari program PBIJK dalam perencanaan anggota KPM yang menjadi penerima manfaat. Sadikin merupakan singkatan dari Sakit Sedikit jadi Miskin, sedangkan yang sudah miskin akan jadi lebih miskin lagi. Sedangkan Jamila merupakan singkatan dari Jatuh Miskin Lagi. Oleh karena itu untuk mencegah fenomena tersebut diatas, program PBIJK tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin desil satu dan dua yang menjadi masyarakat inti calon KPM. Namun juga masyarakat yang tergolong baru saja sejahtera namun terancam Sadikin dan Jamila.

* + - 1. *Dukungan Sektor Swasta*

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam proses perencanaan program melalui mekanisme musyawarah (Musdes, Muskel, atau Musrenbang), maka salah satu pesertanya merupakan perwakilan dari dunia usaha atau *private sector*. Dengan melibatkan dunia usaha dalam proses perencanaan program akan menghasilkan usulan-usulan yang mendukung untuk pengembangan UKM dan *private sector*. Dengan berkembangnya UKM dan *private sector* maka akan terbuka banyak lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat miskin.

Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ponggok yang menyatakan bahwa banyak pengusaha ayam dan peternakan diwilayah Kecamatan Ponggok. Hal ini didukung oleh data dari dinas peternakan bahwa Kecamatan Ponggok merupakan wilayah dengan jumlah peternak ayam terbesar nomor dua di Kabupaten Blitar. Pengusaha ayam tersebut senantiasa membuka kesempatan bagi warga sekitar untuk bekerja dipeternakan. Baik yang bertugas untuk mengangkat pakan (kuli panggul), memberi pakan ayam, mengumpulkan telur ayam, maupun membersihkan kandang ayam. Dukungan tersebut secara langsung disampaikan oleh pemilik usaha kepada masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan ayam berada.

Dukungan semacam ini secara tidak langsung merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk bekerja. Sudah semestinya jika pemerintah daerah mendukung upaya-upaya tersebut dengan cara mengeluarkan perencanaan penyusunan kebijakan yang membantu peternak ayam. Misalnya seperti yang pernah dilakukan, yaitu kerjasama antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan DKI Jakarta yang membuat kesepakatan bahwa telur diwilayah DKI Jakarta akan dipenuhi oleh pemasok telur dari Kabupaten Blitar. Dengan demikian usaha peternakan ayam akan bertahan, sehingga akan tetap mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat miskin yang ada diwilayahnya masing-masing.

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan yang telah diuraikan terhadap perencanaan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka memberikan pelayanan ekonomi masyarakat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Blitar sudah melaksanakan seluruh tahapan perencanaan pada teori perencanaan, yaitu tahap penyusunan rencana, tahap penetapan rencana, tahap pengendalian pelaksanaan rencana, dan tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Selain itu proses perencanaan program yang dilakukan juga sudah sesuai dengan tata cara perencanaan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017; dan
2. Fakor penghambat perencanaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu faktor sumberdaya manusia perencana; faktor lingkungan sosial dan budaya; serta faktor sistem yang digunakan. Sedangkan faktor pendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu perencanaan program secara mandiri oleh pemerintah; serta dukungan sektor swasta.

Daftar Pustaka

Ahmad, Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Alisjahbana. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Allmendinger, Philip. (2009). *Planning Theory (2nd edition)*. England: Palgrave Macmillan.

Assegaf, N.A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dan Problematika Kemiskinan*. Malang: Intrans Publishing.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. (2019). *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2018*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Bryson. (2016). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Conyers, Diana. (1991). *An Introduction To Social Planning In The Third World (Diterjemahkan oleh Susetiawan).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dey, Ian. (1993). *Qualitative Data Analysis*. New York: Routledge Taylor And Francis Group.

Effendi, Tadjuddin Noer. (1995). *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yoga.

Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Faludi, Andreas. (1973). *Planning Theory*. Oxford: Pergamon Press.

Khomsan., & Dharmawan. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Kerjasama Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Moleong., Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjafrizal. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.

1. \* Corresponding author. Tel.: +62-853-300-00442; e-mail: wirasakti.dicky@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)